



**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
JAWA TENGAH - JAWA TIMUR
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOGIRI DAN KABUPATEN KARANGANYAR)**

OLEH:

**Tim Peneliti
Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
1994**

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1.a. Judul Penelitian: Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan
Jawa Tengah - Jawa Timur (Studi Kasus
Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Karanganyar)
b. Bidang ilmu : Ekonomi.
c. Kategori : Pemula.

2. Kepala Proyek Penelitian :

a. Nama : Drs. Bagio Mudakir
b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
c. Pangkat/Gol/NIP :
d. Jabatan Sekarang :
e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Studi Pembangunan.
f. Universitas : Diponegoro Semarang.
g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi.

3. Jumlah tim peneliti : 5 orang.

Ketua : Drs. Bagio Mudakir ; FE UNDIP
Anggota : 1. Drs. Mudji Rahardjo, SU ; FE UNDIP
2. Drs. Mustafa Kamal ; FE UNDIP
3. Drs. Prasetiono ; FE UNDIP
4. Drs. L Suryanto ; FE UNDIP

4. Lokasi Penelitian : Kab. Wonogiri & Kab. Karanganyar

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan.

6. Biaya Yang Diperlukan : Rp 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah)

7. Dibiayai Melalui Proyek: Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro Tahun 1993/94

Semarang, 31 Januari 1994

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Ekonomi UNDIP



Dr. Suyudi
NIP 130 324 151

Mengetahui,
Ketua Lembaga Pene-
litian UNDIP,

R. Boedhi Darmojo
NIP 130 431 357

Kepala Proyek
Penelitian,

Drs. Bagio Mudakir
NIP 130 937 140

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN JAWA TENGAH - JAWA TIMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOGIRI DAN KABUPATEN KARANGANYAR)

Keserasian pembangunan antar wilayah diantaranya dapat dicapai dengan mendorong peningkatan pembangunan pada wilayah yang relatif terbelakang. Upaya ini bisa ditempuh dengan perencanaan wilayah (regional planning) yang bertujuan untuk mengurangi ketidak seimbangan antar wilayah (unbalanced pattern) dan sekaligus untuk memperbaiki alokasi sumber daya yang efisien.

Penelitian dilakukan pada wilayah perbatasan antara Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan kasus Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kabupaten Dati II Karanganyar, dengan pertimbangan kedua daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih rendah serta memiliki potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disusun dasar-dasar perencanaan pengembangan wilayah perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, guna memperbaiki alokasi sumber daya serta upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Studi dilakukan terhadap 4 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Purwantoro (Kabupaten Wonogiri) dan Kecamatan Tawangmangu (Kabupaten Karanganyar) sebagai wakil dari kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Kismantoro (Kabupaten Wonogiri) dan Kecamatan Jenawi (Kabupaten Karanganyar) sebagai wakil kecamatan yang memiliki aksesibilitas rendah.

Dengan melihat potensi fisik, sosial serta ekonomi dari kedua Kabupaten tersebut maka arahan pengembangan yang merupakan syarat tumbuh adalah pengembangan aktivitas pariwisata dan/atau produksi pertanian non pangan.

Sedangkan kendala-kendala yang ditemui didalam implementasi arahan pengembangan, yakni kendala phisik antara lain topografi berbukit menyulitkan pembangunan prasarana perhubungan, adanya curah hujan yang rendah, sistem pengairan yang kurang mendukung serta kurangnya infrastruktur dasar. Kendala sosial antara lain; tingginya angka pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan yang rendah, ketrampilan tenaga kerja yang kurang, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kurang serta kurangnya koordinasi dalam penanganan kamtibmas. Kendala ekonomi berupa belum adanya paket kebijakan pengembangan pariwisata terpadu, kurangnya minat investasi swasta, rendahnya frekuensi bimbingan dan penyuluhan, migrasi sumber daya manusia yang besar dan teknologi produksi yang masih rendah.

Dari hasil penelitian ini, akhirnya merekomendasi beberapa alternatif pengembangan wilayah perbatasan dengan 3 (tiga) skenario dengan keuntungan, kerugian serta kebijakan yang harus diambil untuk masing-masing skenario.

ABSTRACT

STRATEGY OF BORDER AREA DEVELOPMENT BETWEEN CENTRAL JAVA AND EAST JAVA PROVINCE (CASE STUDY IN WONOGIRI AND KARANGANYAR REGENCY)

Harmony of development among regions can be achieved by encouraging the improvement of development in underdeveloped area. This effort can be applied by regional planning to reduce unbalanced pattern among regions and to improve resources allocation efficiently as well.

This research is conducted on border area between Central-Java and East Java Province. Wonogiri and Karanganyar are chosen as location regencies by considering their economic growth are still low and they are potentially developed areas.

From this study, it is expected that planning basis of border area development of the two provinces could be constructed in order to improve not only resources allocation but also economic growth and equity of development yields.

This study is undertaken in four subdistricts of eleven existed subdistricts, namely Purwantoro and Tawangmangu represent subdistrict which have high accessibility with East Java. On the other hand, Kismantoro and Jenawi represent low accessibility of subdistricts.

By observing not only physical, and social but also economic potency of both regencies, this study recommends that development of tourism activities and non cropping agricultural production are well optional policy to be developed as conditional growth.

However, the following constraints in implementing development policy should be noticed. First, physical constraints, such as hilly topography that hampers development of transportation infrastructure; low rainfall; insufficient irrigation system and lack of basic infrastructures. Second, social constraints e.g high population growth; low education level, unskill labour, lack of not only education and health facilities but also coordination of security handling. Third,

economic constraint, such as no policy of fusion development tourism, lack of private investment, low frequency of consolidation, huge human resources migration and low production technology.

Finally, this study recommends three scenarios of border area development alternatives based on profit, loss and policies that should be applied in each scenario.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas selesainya penyusunan laporan penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Jawa Tengah - Jawa Timur (Studi Kasus Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar)

Banyak bantuan yang kami terima dalam kaitanya dengan penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang telah membantu membiayai penelitian ini dan dengan tidak henti-hentinya memberikan dorongan agar penelitian ini dapat terlaksana.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang dengan kewenangannya mengizinkan peneliti melakukan tugas ini.
3. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu terlaksananya penelitian ini.

Kami sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan demi lebih baiknya hasil penelitian ini.

Semarang, 31 Januari 1994

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB	I. PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Studi	1
	1.2. Tujuan dan Manfaat	3
	1.3. Ruang Lingkup Studi	4
	1.4. Metodologi Penelitian	5
	1.4.1. Kerangka Pemikiran Studi	5
	1.4.2. Area Studi dan Unit Analisis	6
	1.4.3. Jenis Data yang Diperlukan dan Teknik Pengumpulan Data	7
	1.5. Sistematika Pembahasan	8
BAB	II. DESKRIPSI UMUM WILAYAH PERBATASAN PROPINSI DATI I JAWA TENGAH, KASUS STUDI DI KABUPA- TEN DATI II WONOGIRI DAN KARANGANYAR	10
	2.1. Karakteristik Fisiografis	11
	2.2. Kondisi Demografis	13
	2.3. Keadaan Perekonomian	18
BAB	III. POTENSI, ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH PER- BATASAN DAN PERMASALAHANNYA	20
	3.1. Potensi Wilayah Kecamatan Perbatasan	20
	3.1.1. Potensi Fisik	20
	3.1.2. Potensi Sosial	27
	3.1.3. Potensi Ekonomi	37
	3.1.4. Kesimpulan	41
	3.2. Arah-an Pengembangan Wilayah	43
	3.3. Kendala-kendala Implementasi Arah-an Pengembangan Wilayah	47

BAB	IV. PENUTUP	53
	4.1. Model Pengembangan Wilayah dan Matriks Keterkaitan Potensi - Arahana - Kendala	53
	4.2. Rekomendasi	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Karakteristik Fisiografis Kabupaten Dati II Wonogiri dan Karanganyar	12
2.2.	Penduduk di Kabupaten Sampel Menurut Umur dan Kelamin, 1991	13
2.3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sampel, 1991	15
2.4.	Penduduk Usia 5 Tahun Keatas di Kabupaten Sampel Menurut Pendidikan	16
2.5.	Penduduk Menurut Mata Pencahariannya di Kabupaten Sampel, 1991	17
2.6.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sampel, 1990 (Jutaan rupiah, Harga Konstan 1983)	19
3.1.	Potensi Fisik di Wilayah Kecamatan Perbatasan	25
3.2.	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Kelamin, 1991	28
3.3.	Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan, 1991	30
3.4.	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Mata Pencaharian, 1991	32
3.5.	Perkembangan Mata Pencaharian Penduduk (%), 1988 - 1991	33
3.6.	Fasilitas Sosial di Wilayah Kecamatan Perbatasan	36
3.7.	Fasilitas Ekonomi di Wilayah Kecamatan Perbatasan	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Studi

Sejak PELITA III Pemerintah telah mengindikasikan kebijaksanaan umum yang memperhatikan arah pembangunan sesuai strategi pendekatan yang dinyatakan dalam perbidangan Pola Umum Pelita Nasional, yaitu Bidang Pembangunan Daerah. Dalam perkembangannya, arah kebijaksanaan di bidang Pembangunan Daerah melalui pendekatan sistem pengembangan wilayah telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan secara nyata dalam bentuk pelaksanaan Program-program Pengembangan Wilayah. Seperti diketahui, pengembangan wilayah adalah merupakan suatu pendekatan untuk pembangunan daerah, yang bisa berarti sebagai :

- a. Sistem pembangunan yang dilaksanakan di daerah, sesuai dengan kondisi atau potensi, masalah dan spesifikasi setempat, di mana keseluruhan sumber daya suatu wilayah/ruang tertentu, dikembangkan secara terpadu, tanpa memandang batas-batas administrasi.
- b. Program pembangunan wilayah yang konsisten dengan azas Pembangunan Nasional, yaitu azas manfaat, merata, kepercayaan pada diri sendiri (kemampuan dan kekuatan sendiri) serta modal dasar (kedudukan geografis, sumberdaya alam/manusia dan sebagainya) dan faktor-faktor dominan (demografi, sosial budaya, kemungkinan-kemungkinan pengembangan), dengan sasaran utama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Upaya langsung dalam membina dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pengertian pengembangan wilayah di sini adalah sebagai suatu model atau pendekatan yang digunakan untuk mempercepat kemajuan suatu wilayah, baik

dengan cara pendayagunaan sumber-sumber (alami, manusiawi, dan kelembagaan) yang tersedia maupun dengan cara memberikan rangsangan dari luar, dengan cakupan seluruh aspek kehidupan/kegiatan masyarakat. Hal ini semua dilakukan dalam rangka memperbaiki efisiensi dalam alokasi sumberdaya dengan cara implementasi proyek sektoral terpadu, serta mengurangi perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah, karena kegiatan pembangunan wilayah itu sendiri mengarah pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus keserasian tingkat pembangunan diantara mereka. Tujuan akhirnya ialah mengeliminir tingkat disparitas yang tinggi antar wilayah. Karena kesenjangan atau disparitas perkembangan wilayah tidak hanya merupakan masalah bagi wilayah yang terbelakang namun juga menimbulkan permasalahan bagi wilayah yang sudah maju.

Keserasian pembangunan antar wilayah diantaranya dapat dicapai dengan mendorong peningkatan pembangunan pada wilayah yang relatif terbelakang. Upaya ini bisa ditempuh dengan perencanaan wilayah (regional planning) yang bertujuan untuk mengurangi ketidak seimbangan antar wilayah (unbalanced pattern) dan sekaligus untuk memperbaiki alokasi sumberdaya yang efisien. Salah satu ujung tombak yang utama di dalam perencanaan wilayah adalah dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi potensi wilayah yang bersangkutan.

Identifikasi dilakukan pada wilayah perbatasan mengingat adanya permasalahan pokok di wilayah ini, yakni adanya batas-batas administrasi yang tidak jelas diantara dua atau lebih wilayah yang berbatasan. Dengan ketidak jelasan batas administrasi ini akan menyulitkan di dalam penyusunan rencana pengembangan, implementasi rencana, maupun di dalam aspek monitoring dan pengendalian program-program pengembangan wilayah. Karena dengan ketidak jelasan batas administrasi otomatis membawa akibat ketidak jelasan kewenangan di dalam penanganan wilayah perbatasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dilakukan studi mengenai identifikasi potensi dalam konteks penelusuran model pengembangan wilayah perbatasan Propinsi Jateng - Jatim, dengan mengambil kasus studi di Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kabupaten Dati II Karanganyar. Kedua wilayah ini terletak di Propinsi Dati I Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk melakukan identifikasi potensi sebagai dasar di dalam menyusun perencanaan pengembangan wilayah perbatasan Propinsi Jateng - Jatim, guna memperbaiki alokasi sumberdaya dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Penelusuran tersebut akhirnya akan mengarah pada ditemukannya suatu model pendekatan pengembangan wilayah perbatasan dengan sektor-sektor strategis yang merupakan potensi utamanya. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi fisik, sosial, dan ekonomi dari wilayah-wilayah di perbatasan propinsi.
2. Dari potensi yang ada diarahkan pengembangannya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya juga meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
3. Menemukan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala sehubungan dengan potensi yang dimiliki dan implementasi arahan pengembangan.
4. Menentukan suatu model yang berupa pendekatan bagi pengembangan wilayah di perbatasan propinsi yang mempertimbangkan aspek sektoral dan aspek spasial (tata ruang).

Adapun manfaat atau kegunaan utama dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan suatu rumusan model atau pendekatan pengembangan wilayah perbatasan, yang merupakan suatu konsepsi pemikiran. Di samping itu untuk keperluan praktek, hasil studi ini dapat memberikan suatu informasi bagi perencanaan dan pengambil keputusan mengenai data pokok potensi-potensi utama wilayah perbatasan yang dapat dikembangkan, arahan pengembangan serta kendala atau permasalahan yang perlu diantisipasi di dalam implementasi arahan pengembangan segenap potensinya.

1.3. Ruang Lingkup Studi

Pendekatan perencanaan terhadap pengembangan wilayah perbatasan antar propinsi diarahkan untuk menelusuri dan menemukan suatu model pendekatan yang nantinya dapat dipakai bagi wilayah-wilayah perbatasan lain, walaupun potensi dan kendalanya berbeda. Sebagai langkah pertama adalah melakukan identifikasi potensi, yakni dengan melakukan inventarisasi terhadap segenap potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, jenis dan jumlah fasilitas sosial ekonomi, serta kelengkapan prasarana dan utilitas umum.

Dari identifikasi tersebut dianalisis sesuai konsep-konsep teoritik pengembangan wilayah, sehingga akan diperoleh arahan-arahan pengembangan wilayah atas dasar potensi-potensinya. Arahan pengembangan di sini merupakan penjabaran dari tujuan-tujuan pembangunan yang bila dijabarkan lagi akan diperoleh rumusan program dan proyek terpadu pada skala wilayah/daerah. Dalam mengartikan pengembangan wilayah sebagai salah satu cara berpikir atau suatu pendekatan, maka usaha ini tidak terlepas dari upaya memasukkan disiplin tata ruang. Disiplin tata ruang dapat diartikan sebagai suatu usaha optimasi

dan efisiensi di dalam pemanfaatan dan penataan ruang wilayah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas tanpa mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahap implementasi arahan-arahan pengembangan yang telah disusun/dirumuskan atas dasar telaah potensi spesifik suatu wilayah, akan ditemui beberapa kendala yang menjadi permasalahan pengembangan wilayah. Untuk itu perlu diajukan beberapa rekomendasi yang diklasifikasikan dalam beberapa alternatif atau skenario pengembangan wilayah, beserta prioritas penanganan masalahnya.

Dalam studi ini "wilayah" diartikan sebagai suatu unit/satuan analisis (wilayah administrasi) dan bukan sebagai suatu wilayah perencanaan (planning region). Dengan kata lain sudut pandang di dalam mengartikan kata wilayah adalah dari aspek subyektif (subjective view), dan bukan sudut pandang obyektif (objective view) yang mengartikan wilayah sebagai suatu tujuan (planning region) tetapi wilayah sebagai suatu fakta atau unit analisis (bisa berupa homogeneous region, nodal region, atau administrative region).

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Kerangka Pemikiran Studi

Latar belakang permasalahan di wilayah perbatasan secara umum (teoritik) adalah adanya disparitas pertumbuhan antar wilayah dan inefisiensi alokasi sumberdaya antar wilayah. Secara spesifik, permasalahan pokoknya adalah adanya ketidak jelasan batas-batas administrasi diantara dua atau lebih wilayah yang berbatasan. Permasalahan tersebut penting, terutama sehubungan dengan fungsi wilayah perbatasan sebagai koridor yang menghubungkan propinsi satu dengan propinsi lainnya.

Dari latar belakang permasalahan dan adanya tujuan pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas dan memperbaiki alokasi sumberdaya, maka sebagai langkah awal perlu dilakukan studi identifikasi terhadap potensi-potensi wilayah perbatasan, dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, strategi, dan program pengembangan wilayah. Identifikasi meliputi inventarisasi potensi-potensi fisik, ekonomi, dan sosial, terutama yang strategis bagi pengembangan wilayah. Sesuai dengan potensinya, dapat ditetapkan arahan pengembangan wilayah. Implementasi arahan pengembangan tersebut dibatasi oleh beberapa kendala/permasalahan, sehingga dapat diajukan rekomendasi dalam beberapa alternatif.

1.4.2. Area Studi dan Unit Analisis

Studi dilakukan pada wilayah perbatasan antara Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan kasus Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kabupaten Dati II Karanganyar. Pertimbangan diambilnya kedua Kabupaten tersebut sebagai sampel karena keduanya terletak di perbatasan propinsi, memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, serta memiliki potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Kabupaten Dati II Wonogiri terdiri dari 22 Kecamatan, dimana 8 (delapan) Kecamatan diantaranya terletak di perbatasan, yakni Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Purwanto, Kecamatan Kismantoro, Kecamatan Jañiroto, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Giriwoyo, dan Kecamatan Giritontro. Sedangkan Kabupaten Dati II Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, dimana 3 (tiga) Kecamatan diantaranya ada di perbatasan, yakni Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, dan Kecamatan Tawangmangu.

Dengan demikian "populasi" kecamatan pada kedua Kabupaten sampel adalah 11 kecamatan, yakni 8 kecamatan

ada di Kabupaten Dati II Wonogiri dan 3 kecamatan ada di Kabupaten Dati II Karanganyar. Dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada pada kedua Kabupaten sampel tersebut diambil 4 Kecamatan sebagai sampel, dengan pertimbangan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, serta pertimbangan lokasi di mana keempat wilayah Kecamatan tersebut benar-benar berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur. Keempat kecamatan sampel dibedakan atas kriteria aksesibilitasnya dengan Propinsi Jawa Timur, sehingga dipilih 2 kecamatan yang mempunyai aksesibilitas tinggi dan kecamatan lainnya yang aksesibilitasnya rendah. Untuk masing-masing Kabupaten diambil dua kecamatan dengan perincian satu kecamatan memiliki aksesibilitas tinggi, dan satu kecamatan dipilih yang memiliki aksesibilitas rendah.

Jadi sebagai kecamatan sampel adalah Kecamatan Purwantoro (Kabupaten Dati II Wonogiri) dan Kecamatan Tawangmangu (Kabupaten Dati II Karanganyar), sebagai wakil kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi. Sedangkan kecamatan yang memiliki aksesibilitas rendah diwakili oleh Kecamatan Kismantoro (Kabupaten Dati II Wonogiri) dan Kecamatan Jenawi (Kabupaten Dati II Karanganyar). Dengan demikian sebagai unit analisis dalam studi ini adalah unit wilayah Kecamatan.

1.4.3. Jenis Data yang Diperlukan dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer berupa orientasi lapangan secara nyata yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran riil kondisi daerah perbatasan, baik yang menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Data ini diperoleh dengan teknik wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun. Disamping dengan wawancara, untuk memperoleh data primer ini juga dilakukan pengamatan (obser-

si) langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang ada pada Dinas/Instansi Tingkat I maupun Tingkat II, serta dibantu oleh beberapa bahan kepustakaan yang relevan. Data sekunder ini antara lain terdiri dari kondisi fisiografis wilayah perbatasan, karakteristik ekonomi dan sosial daerah, prasarana dan sarana sosial ekonomi, serta konsep-konsep pengembangan wilayah secara teoritik.

1.5. Sistematika Pembahasan

Laporan studi identifikasi potensi ini dirangkai dalam 4 (empat) bab, dimana pembahasan masing-masing bab adalah terkait antara satu dengan lainnya. Isi masing-masing bab adalah :

Bab I : Pendahuluan; yang menguraikan latar belakang studi, tujuan dan manfaat, ruang lingkup studi, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Deskripsi umum wilayah perbatasan Propinsi Jawa Tengah; yang berisi gambaran umum mengenai karakteristik Kabupaten Dati II Wonogiri dan Kabupaten Dati II Karanganyar, baik karakteristik fisiografis, demografis, maupun keadaan perekonomian daerah.

Bab III : Potensi, arahan pengembangan wilayah perbatasan, dan permasalahannya; yang membahas potensi fisik, sosial dan ekonomi kecamatan-kecamatan sampel, arahan pengembangan yang bisa dirumuskan sesuai dengan potensinya, serta kendala-kendala implementasinya yang merupakan permasalahan pengembangan wilayah perbatasan. Kendala-kendala tersebut dibedakan atas kendala

aspek fisik, aspek sosial, maupun aspek ekonomi.

Bab IV : Penutup; yang berisi bahasan mengenai rumusan model atau pendekatan pengembangan wilayah perbatasan, matriks keterkaitan potensi - arahan - kendala, serta rekomendasi yang diajukan di dalam beberapa alternatif atau skenario pengembangan wilayah perbatasan.